

# LANDASAN II PAPUA BARAT

Kegiatan Pendampingan Sinergi Perencanaan dan Penganggaran Kampung, Puskesmas dan Sekolah



## TEKAD MEMBANGUN PERENCANAAN TERSINERGI DI KAMPUNG MARSII

Oleh: Halia Asriyani  
(KM Officer Landasan II)

Berjarak sekira 10 km dari Ibukota Kabupaten Kaimana, di bagian Timur terdapat sebuah kampung bernama Kampung Marsi. Jalan menanjak dan berliku membelah perbukitan mewarnai perjalanan menuju kampung ini. Sebagian jalanan menuju kampung adalah jalan tidak beraspal dengan batu kerikil yang membuat perjalanan menjadi lambat. Namun sambutan pemandangan indah dari Kolam Sisir yang hijau dalam perjalanan membuatnya jadi tidak menjenuhkan.

Kampung Marsi adalah kampung yang dihuni oleh Suku Mairasi, salah satu suku tertua di Kaimana. Mairasi berarti orang berkulit hitam dan berambut keriting. Namun kini telah banyak pendatang yang bekerja dan menetap di Kampung Marsi. Kondisi ini sedikitnya menggambarkan keterbukaan orang-orang Mairasi kepada pendatang.

Musyawaharah Kampung,  
Melihat Masalah  
Bersama-sama -3

Langkah Awal Menuju  
Sinergitas  
Perencanaan - 5

Pagi itu, 3 Februari 2020, satu per satu orang berdatangan di Balai Kampung Marsi. Mereka adalah aparat kampung dan para tokoh masyarakat yang hendak mengikuti proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK). Setelah selesai dengan pemilihan kepala kampung pada akhir tahun 2019, kini saatnya mereka menyusun RPJMK. Kali ini, proses penyusunan RPJM Kampung Marsi akan dilakukan dengan melibatkan perwakilan dari bidang kesehatan dan pendidikan. Mereka adalah para staf Pustu Kampung Marsi serta para pengajar SD YPK SISIR I yang turut hadir pula pagi itu.

Pendampingan sinergi Perencanaan dan Penganggaran Kampung, Puskesmas dan Sekolah di Kampung Marsi berlangsung selama lima hari (3-7 Februari 2020). Para peserta belajar sekaligus mempraktikkan langsung proses perencanaan kampungnya. Kegiatan ini dipandu oleh tim fasilitator dari Provinsi Papua Barat dan dari Kabupaten Kaimana yang sebelumnya telah dipersiapkan melalui kegiatan *training of trainer* sinergitas perencanaan oleh tim KOMPAK-LANDASAN pada November 2019 lalu. Mereka adalah Umi Riantiny dari DPMK Provinsi Papua Barat yang akan memfasilitasi kelompok kampung bersama dengan Barnesia Ketsia Dias dari DPMK Kabupaten Kaimana dan Moh. Dain Warfete dari Bappeda Kabupaten Kaimana. Kelompok Kesehatan sendiri difasilitasi oleh Richard Tombiling dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana. Sementara kelompok pendidikan difasilitasi oleh Blasius Kilmas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kaimana.

Melalui sinergitas perencanaan ini akan lahir usulan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) dan Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK); Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Pustu Kampung Marsi; serta Rencana Kerja Sekolah (RKS), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) SD YPK Sisir I. Semua dokumen ini nantinya akan menjadi acuan dalam melakukan kegiatan pembangunan di Kampung Marsi. Juga menjadi program yang akan dilaksanakan Pustu dan Sekolah dalam memberikan pelayanan dasar bagi masyarakat Kampung Marsi.



“

Kita bertekad untuk membuat RPJM Kampung sendiri sesuai dengan masukan dan kebutuhan masyarakat

"Kita bertekad untuk membuat RPJM Kampung sendiri sesuai dengan masukan dan kebutuhan masyarakat," tegas Kepala Kampung Marsi, Roni Jaisona dalam sambutannya pada pembukaan kegiatan. Roni sendiri sebelumnya adalah kader kampung yang mengelola SAIK (Sistem Administrasi dan Informasi Kampung) di Kampung Marsi. Data SAIK yang tersedia inilah kemudian menjadi acuan dalam membuat perencanaan kampung yang berbasis data.

Sebelum mulai melakukan perencanaan, para peserta memperoleh materi pengantar dari para fasilitator berupa pentingnya menyusun perencanaan; penyalarsan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Kaimana; penganggaran dana desa; perencanaan dan manajemen puskesmas bagi kelompok kesehatan; dan penyusunan profil sekolah dan raport mutu bagi kelompok pendidikan.

Selanjutnya para peserta mulai berfokus pada sektor masing-masing untuk melakukan pengkajian data dan identifikasi masalah. Pada tahap ini pun mereka menentukan prioritas dari masalah-masalah yang telah diidentifikasi bersama. Hasilnya lalu disampaikan dalam musyawarah kampung untuk diverifikasi dan disepakati bersama-sama.

## MUSYAWARAH KAMPUNG, MELIHAT MASALAH BERSAMA-SAMA

Dalam musyawarah kampung, pihak sekolah dan Pustu hadir untuk menyampaikan hasil identifikasi mereka tentang permasalahan kesehatan dan pendidikan di Kampung Marsi berdasarkan data yang mereka miliki. Proses partisipatif pun terjadi dalam tahap ini. Semua peserta berkesempatan untuk menyampaikan saran dan harapannya terkait layanan dasar di kampung. Dalam pemaparan perwakilan Pustu Kampung Marsi, terdapat empat kondisi kesehatan di Kampung Marsi yang menjadi prioritas. Masalah tersebut antara lain adanya tujuh kasus balita dengan gizi kurang; 80% ibu hamil tidak melahirkan di Fasilitas Layanan Kesehatan; terdapat 80% bayi usia 0-11 bulan yang tidak memperoleh Imunisasi Dasar Lengkap (IDL); dan 77,46% keluarga tidak menggunakan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan pemaparan dari Pustu Kampung Marsi, banyak dari peserta yang mulai menyadari bahwa masalah-masalah tersebut memang perlu mendapat perhatian. Richard Tombiling, fasilitator kelompok kesehatan menyampaikan bahwa kasus gizi kurang ini perlu ditangani dengan benar. “Ini fakta yang kita temukan. Ada tujuh balita mengalami gizi kurang. Kalau ini sampai ke level gizi buruk, itu tidak akan bisa disembuhkan,” tegasnya. Para peserta tampak kaget, sebagian dari mereka mengaku baru mengetahui hal tersebut. Pihak Pustu memaparkan penyebab kondisi ini diantaranya pengetahuan orangtua yang kurang mengenai gizi bahkan sejak masa kehamilan.

Sementara itu, Kampung Marsi hingga kini belum memiliki Posyandu. Hal tersebut menyebabkan perkembangan balita tidak terpantau dengan baik oleh petugas kesehatan. Peserta lalu menyimpulkan bahwa ketiadaan Posyandu ini menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kasus gizi kurang di kampung mereka dan menjadi penyebab bayi usia 0-11 bulan tidak memperoleh Imunisasi Dasar Lengkap. “Ayo Pak Kepala Kampung, Posyandu ini penting. Kita bisa periksa anak-anak dengan teratur. Anak-anak ini masa depan kita,” ungkap Poibe Sihotang, perawat di Pustu Kampung Marsi.



Sedangkan untuk kasus gizi kurang yang terjadi, program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) akan dilakukan selama enam bulan kemudian dievaluasi hasilnya. Untuk itu, mereka membutuhkan bantuan dana dari kampung dalam menjalankan program tersebut.

Mengenai persoalan ke dua di mana 80% ibu hamil tidak melahirkan di Pustu menyebabkan risiko kematian ibu dan bayi saat persalinan menjadi tinggi. “Ibu-ibu mungkin merasa lebih nyaman di rumah saja. Dipikirkannya kami juga bisa datang membantu proses persalinan. Tapi tidak bisa kami bawa semua alat-alat kesehatan yang dibutuhkan kalau darurat. Belum lagi kondisi tempatnya tidak steril. Ini penting dan harus kita perhatikan bersama,” ungkap Hasrawati, Bidan Pustu Kampung Marsi.

Pada kesempatan tersebut, muncul saran dari peserta untuk melakukan sosialisasi bagi ibu-ibu hamil agar melahirkan di pustu. Namun pihak pustu mengaku telah melakukan hal tersebut kepada ibu-ibu yang datang memeriksakan kehamilannya. Hasilnya tetap saja ibu tersebut tidak melahirkan di Pustu. Menurut mereka, akan lebih baik jika terdapat peraturan kampung (perkam) yang mengharuskan ibu hamil melahirkan di fasilitas kesehatan, termasuk kewajiban memeriksakan kehamilan minimal empat kali selama masa kehamilan.



Mengenai air bersih, seluruh peserta menyepakati bahwa memang ini adalah masalah penting. Berdasarkan analisa masalah menggunakan alat sketsa kampung, peserta menemukan bahwa kasus diare memang banyak terjadi di daerah yang tidak memperoleh aliran air bersih. Pihak kampung pun menyetujui untuk membuat jaringan pipa yang mengantarkan air bersih ke rumah-rumah warga yang belum teraliri sebagai solusi masalah ini.

Dari bidang pendidikan sendiri, pihak sekolah berhasil mengidentifikasi beberapa permasalahan. Salah satunya adalah tidak tercukupinya buku pelajaran untuk menunjang proses belajar siswa. Alokasi dana BOS sendiri tidak cukup untuk mengadakan buku-buku pelajaran tersebut. “Anak-anak kami itu ada 66 orang. Masing-masing di kelas ada 9-15 orang. Tapi paling banyak cuma ada 3 buku pelajaran. Solusi kami adalah meminta mereka fotokopi, tapi hanya sedikit juga yang mampu fotokopi.” Jelas Sri Wahyuni, Guru SD YPK Sisir I.

“Ya itu anak-anak kami memang berapa kali bilang mau fotokopi buku. Tapi sering kita sedang tidak ada uang juga.” Ungkap Frengki Nanggewa, salah satu peserta musyawarah.

Masalah kurangnya jam belajar juga menjadi perhatian penting dalam forum ini. Siswa masuk sekolah seringkali di antara pukul 09.00 hingga 10.00, kemudian sudah pulang pukul 12.00. Untuk itu Fitri L.Tawang, Gusu SD YPK Sisir I menghimbau kepada orangtua agar bisa mengingatkan anak-anaknya ke sekolah tepat waktu serta ikut memperhatikan jam belajar anak-anak mereka di rumah. Kurangnya kemampuan akademik siswa terbukti dari hasil ujian sekolah yang sebagian besar memperoleh nilai di bawah standar juga disampaikan oleh tim sekolah. Mereka bermaksud mengadakan jam pelajaran tambahan dengan bantuan pembiayaan guru honor dari kampung.

Mengetahui kondisi kesehatan dan pendidikan di kampungnya, Kepala Kampung Marsi, Roni Jaisona menyampaikan bahwa musyawarah ini telah membuka mata kita. Baginya, masalah kesehatan dan pendidikan adalah juga masalah kampung. Ia berjanji untuk memperhatikan temuan yang telah disampaikan dalam menyusun program kerjanya.

Proses musyawarah ini menjadikan seluruh masalah bisa dilihat bersama-sama. Sebagian besar masalah ini menuntut peran berbagai pihak untuk mengatasinya dan forum ini menjadi langkah awalnya.

Beberapa usulan yang berhasil disepakati di bidang kesehatan diantaranya pembuatan peraturan kampung untuk mewajibkan ibu-ibu melahirkan di fasilitas layanan kesehatan yang tersedia dan memeriksakan diri selama masa kehamilan; pembangunan posyandu beserta insentif kader untuk memantau perkembangan anak; dukungan penyelenggaraan kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita gizi kurang; membantu pengadaan beberapa alat-alat pemeriksaan kesehatan; serta sosialisasi kesehatan.

Untuk sektor pendidikan, kampung bersedia untuk membantu pengadaan buku pelajaran siswa dan membiayai guru honor untuk mengajar di kelas tambahan bagi siswa. Kampung juga menyisihkan dana tambahan untuk menambah buku bacaan dan membangun perpustakaan bagi sekolah. Termasuk membantu perbaikan atap sekolah yang rusak.

Selesai dengan RPJMK, selanjutnya peserta bersama-sama menentukan kegiatan yang akan dianggarkan pada tahun 2020 dalam RKPK. Proses musyawarah pun diakhiri dengan kesepakatan bersama antara kampung, Pustu dan sekolah.

Sampai di sini penyusunan dokumen RPJMK belum berakhir. Masih ada proses panjang yang akan mereka lalui. Terutama Tim 11 sebagai penyusun dokumen RPJMK. Namun mereka berkomitmen untuk menyelesaikan dokumen RPJMK pada akhir Maret 2020. Selama itu, proses pendampingan akan terus berjalan oleh fasilitator lokal dan tim KOMPAK-LANDASAN. Begitu pula Pustu dan sekolah yang masih harus menyempurnakan dokumen perencanaan mereka.





## LANGKAH AWAL MENUJU SINERGITAS PERENCANAAN

Membuat RPJM bagi peserta adalah hal baru. Sebelumnya, kampung tidak pernah membuat RPJM mereka sendiri. Hal ini diakui oleh Origenes Talahatu, Kepala Kampung Marsi pada periode sebelumnya yang kini tergabung dalam Tim 11 penyusunan RPJMK. “Kita selama ini tidak pernah buat RPJMK sendiri. Apalagi mau melibatkan sekolah dan pustu. Ini langkah yang bagus. Selama lima hari ini kita merasa seperti bermain saja, karena kegiatannya santai. Tapi terasa manfaatnya. Selanjutnya apa yang sudah diputuskan ini, yang sudah kita susun di RPJMK, nanti di lapangan yang menentukan. Kita bertugas mendukung dan mengawas, karena kita semua mau kampung jadi baik,” ungkapnya.

Forum musyawarah kampung yang melibatkan sekolah dan Pustu juga adalah hal yang baru. Dengan adanya proses ini, semua peserta bisa terbuka mengemukakan pendapat dan melihat masalah bersama-sama. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Rosmina Lodar, Kepala SD YPK Sisir I. “Ini pertama kalinya kami dilibatkan dalam penyusunan RPJM Kampung. Bersyukur sekali ada proses ini sehingga masalah pendidikan bisa kita pikirkan sama-sama. Selama ini kami memutar otak bagaimana menyelesaikan masalah pendidikan agar bisa memenuhi delapan standar pendidikan. Apalagi dengan jumlah dana BOS yang jelas tidak mencukupi untuk mengatasi permasalahan kami.”

“Proses ini bagus sekali, kita benar-benar bersama dari awal menentukan program. Memang bagusya begitu, karena tidak semua paham kondisi kesehatan di sini. Sekarang sudah sadar dengan masalah kesehatan di kampung kita toh?” Ungkap Poibe Sihotang dari Pustu Kampung Marsi.

Kegiatan ini juga membuat kita belajar menganalisa masalah. Jadi tidak langsung membuat usulan tapi mencari penyebab masalah terlebih dahulu supaya tidak keliru menentukan program.” tambahnya.

Desiderius Bir, Spesialis Kesehatan tim KOMPAK-LANDASAN menyampaikan bahwa dari 17 kampung yang ada di Distrik Kaimana, Kampung Marsi merupakan kampung pertama yang melibatkan masyarakat dalam proses pembuatannya. Riuhan tepuk tangan peserta pun menyambut pernyataan tersebut. Ia juga tak lupa mengingatkan tugas yang masih harus dijalankan hingga dokumen RPJMK bisa benar-benar selesai dan menjadi dokumen yang resmi. “Harapannya adalah Kampung Marsi ini ke depan menjadi contoh bagi kampung lain. Meski baru dalam tahap awal, namun kita telah memulainya bersama.”

Dalam sambutan penutupnya Kepala Kampung Marsi, Roni Jaisona menyampaikan terima kasih kepada tim KOMPAK-LANDASAN yang telah mendampingi jalannya proses ini. Berkali-kali ia juga mengingatkan mengenai pentingnya koordinasi antara kampung, pustu dan sekolah termasuk seluruh masyarakat dalam proses selanjutnya dan demi kemajuan Kampung Marsi. “Kita yang punya kampung, jadi menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memajukannya.”



“Kita yang punya kampung, jadi menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memajukannya.”